

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan dalam cakupan yang luas yaitu berbagai upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik, tidak hanya diukur secara ekonomi maupun fisik melainkan ikut memperhatikan aspek sosial mental dan spiritual. Kesejahteraan sosial meliputi perbekalan dan proses-proses yang secara langsung berkenaan dengan penyembuhan dan pencegahan masalah-masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia dan perbaikan dalam kualitas kehidupan.

Kesejahteraan sosial berupa tindakan pelayanan-pelayanan sosial kepada individu-individu dan keluarga-keluarga ataupun usaha-usaha untuk memperkuat atau mengubah institusi-institusi sosial. Para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan tinggi rendahnya tingkat hidup masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Rukminto (2005:17), kesejahteraan sosial adalah:

“Suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat, dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang.”

Pengertian diatas menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu bidang keilmuan yang berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dilakukan melalui pengelolaan masalah sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga masyarakat terdorong dan bisa mencapai kearah kehidupan yang lebih baik lagi. Konsep dari kesejahteraan sosial adalah pemenuhan terhadap kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar tersebut tidak hanya terdiri dari kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga pemenuhan akan

pendidikan dan kesehatan juga merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sehingga manusia dapat mencapai kondisi yang sejahtera dalam kehidupannya. Walter A. Friedlander dalam (Fahrudin, 2012:9) mengungkapkan konsep kesejahteraan sosial yaitu:

“Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial dengan relasi-relasi pribadi dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka secara penuh, serta untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir yang terbentuk dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok sehingga individu dan kelompok tersebut mampu memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhannya sendiri.

2.1.2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan-tujuan yang sangat mulia guna mencapai suatu taraf kehidupan yang diharapkan oleh masyarakat, terdapat dua tujuan utama dari kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2012:10) yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Kutipan diatas menyatakan bahwa kesejahteraan sosial bertujuan untuk memenuhi standar kebutuhan kehidupan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat serta meningkatkan relasi sosial masyarakat agar masyarakat dapat memiliki sistem sumber untuk mengembangkan taraf kehidupannya menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika sumber-sumber yang ada dimanfaatkan dengan tepat maka akan dapat membantu masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan yakni kondisi masyarakat yang sejahtera yaitu tepenuhinya hal-hal pokok seperti sandang, pangan dan papan.

2.1.3. Fungsi Kesejahteraan Sosial

Ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi terjadinya perkembangan sosial ekonomi menjadi salah satu faktor munculnya masalah sosial. Dalam menghadapi terjadinya perkembangan tersebut masyarakat memerlukan adanya kesejahteraan sosial yang berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang ditimbulkan oleh terjadinya perkembangan sosial ekonomi. Fahrudin (2012:12) memaparkan beberapa fungsi dari kesejahteraan sosial yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi pencegahan (preventive)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

b. Fungsi penyembuhan (curative)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi

kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).

c. Fungsi pengembangan (development)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

d. Fungsi penunjang (support)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan sosialkesejahteraan sosial yang lain.

Pemaparan diatas dapat diartikan bahwa untuk membantu proses pertolongan baik individu, kelompok, maupun masyarakat diperlukan adanya kesejahteraan sosial yang terdiri dari beberapa fungsi yaitu: fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan, dan fungsi penunjang sehingga dengan fungsi tersebut masyarakat yang mengalami masalah keberfungsian sosial dapat kembali berfungsi secara sosial melalui penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

2.1.4. Intervensi Pekerja Sosial

Secara etimologi, Intervensi berasal dari kata atau bahasa Inggris yakni Intervention, kata ini artinya campur tangan atau pelibatan seseorang atau lembaga/negara dalam masalah seseorang, kelompok dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan cara dan strategi tertentu. Sedangkan kata intervensi pada dimensi sosial yaitu bentuk keterlibatan atau campur tangan antara dua belah pihak dalam proses penyelesaian atau penuntasan masalah sosial yang dihadapinya, di mana dilakukan secara terencana dan prosedural. Berkaitan hal ini Intervensi dapat juga dipahami sebagai tindakan spesifik oleh

seorang pekerja sosial dalam rangka mendorong ataupun merancang perubahan sosial agar tercipta keberfungsian sosial pada kliennya.

Intervensi sosial dalam pengertian campur tangan dapat diartikan sebagai bentuk ajakan bagi para pekerja sosial bahwa setiap saat ia harus berani bertindak untuk masuk ke dalam masalah sosial individu ataupun masyarakat yang berada di sekelilingnya. Hal ini sebagaimana pendapat Argyris (1970) dalam Hariyanto (2012) bahwa, Intervensi sosial merupakan kegiatan pekerja sosial yang mencoba masuk ke dalam permasalahan individu, kelompok ataupun suatu objek lain dengan tujuan utamanya membantu keluar dari masalah tersebut. Di mana tujuan utama bantuan yang diberikan adalah memperbaiki fungsi dan peran sosial klien. Dengan asumsi bahwa bila fungsi sosial menjadi baik maka akan berimplikasi pada stabilitas kondisi lainnya. Sehingga intervensi sosial itu sendiri bisa dikatakan sebagai pemicu terhadap pencapaian fungsi-fungsi kesejahteraan lahir dan batin yang selama ini mungkin mengalami hambatan atau berbenturan dengan masalah lainnya.

Definisi intervensi ini akan kehilangan makna bilamana kita tidak mendefinisikan pekerjaan sosial, sebagai objek intervensi. Definisi yang umum tentang pekerjaan sosial dijelaskan oleh Charles Zastrow (1999:12) yang mengatakan bahwa pekerjaan sosial sebagai profesi yang lebih diandalkan dari profesi lain dalam menangani dan melakukan perbaikan terhadap berkembangnya masalah sosial di masyarakat. Selanjutnya Zastrow mengatakan bahwa *social work is the profesional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals*. Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kapasitasnya untuk berfungsi sosial dan menciptakan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan-tujuannya. Penjelasan perkembangan

Intervensi pekerjaan sosial di era Orde Baru yakni, ketika di tahun 1972 Pemerintahan hendak mencanangkan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dalam Repelita tahap ke-2 (tahun 1974-1979). Kala itu, menurut catatan Sumantri (1979) bahwa, atas saran berbagai negara donor dalam Pembangunan Nasional kita, menginginkan bahwa sebaiknya Pemerintah memasukkan rancangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Repelita 2 kelak, di mana program-program yang disarankan harus ada, yakni pengentasan kemiskinan, jaminan sosial, pendirian pusat-pusat pelayanan sosial dan menggiatkan peran pekerja sosial dalam kesejahteraan sosial. Hal ini mengingat di era itu tingginya jumlah penduduk miskin, pengangguran merajalela dan rendahnya pendapatan per kapita penduduk.

Wujud dari pembangunan kesejahteraan sosial tersebut selanjutnya dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, di mana UU ini berisikan 12 Pasal dan salah satu poin inti dari UU tersebut adalah mengoptimalkan peran Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dalam tujuan Pembangunan Nasional. Di sisi lain menurut Sumarnonugroho (1984) bahwa kehadiran UKS dalam UU tersebut adalah simbol dari hadirnya Intervensi sosial dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial, di mana makna campur tangan terjabarkan melalui nilai-nilai khusus dalam UKS, seperti: pemerintah menyantuni keluarga miskin berupa bantuan dana dan barang, pelayanan jasa sosial berupa keterampilan bagi penderita cacat tubuh (penyandang disabilitas), serta perluasan akses pekerjaan bagi para penganggur. Makna campur tangan lainnya juga terjabarkan pada pasal 2 di dalam UU No. 6 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa Usaha Kesejahteraan Sosial ialah semua upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Pemahaman Intervensi sosial oleh pemerintah juga hadir dalam pasal 4. Pekerja sosial komunitas pada tahap identifikasi lebih banyak melakukan peran

fasilitatif dan edukatif. Pada tahap sosialisasi peran pekerja sosial lebih dominan mempraktekan peran representational dan edukatif. Peran berikutnya pada tahap perencanaan pekerja sosial lebih banyak melakukan peran fasilitatif dan pada tahap pelaksanaan pekerja sosial lebih banyak mempraktekan keterampilan pelatihan (edukatif). Kemudian pada tahap evaluasi pekerja sosial lebih mempraktekan peran fasilitatif untuk memfasilitasi tatacara evaluasi dan berbagai aspek yang harus ada dalam proses evaluasi.

a. Peran Pekerja Sosial

Sebagai bagian penting dari kegiatan Pekerjaan Sosial, peran sosial terhadap kegiatan pekerjaan sosial pemberdayaan dan pengembangan sangat lah penting dan berkontribusi langsung terhadap kegiatan pekerjaan sosial. Kontribusi terbesarnya adalah meletakkan pola strategis dalam penanganan masalah sosial, pola atau pendekatan ini menjadi dasar sistem bertindak bagi para pekerja sosial dalam melaksanakan proses pertolongan dengan tepat. Berkaitan hal ini, menurut Harris (2005) bahwa peranan intervensi sosial dapat mencakup seluruh kegiatan pekerjaan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap upaya peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanpa peran intervensi sosial maka seluruh kepentingan pekerjaan

Dalam melakukan proses intervensi , Pekerja sosial hanya berperan memuluskan proses penyelesaian masalah, sebab pada prinsipnya, yang menyelesaikan masalah adalah klien sendiri, intervensi pekerja sosial hanya berperan membantunya menemukan jalan keluar dari masalahnya. Walaupun demikian, tugas-tugas yang mesti dilengkapi oleh pekerja sosial adalah:

a. mengidentifikasi kekuatan dan potensi yang dimiliki klien guna mendukung pemecahan masalahnya sendiri dan memperkuat ketahanan dirinya;

b. mengidentifikasi masalah yang dihadapi klien yang dapat mengancam dan merusak proses penyembuhan dirinya; dan

c. merumuskan prioritas masalah yang akan ditangani dan upaya penanganan secara berlanjut

Peran dan keterampilan yang diperlukan dalam pengemban masyarakat

1. Peran dan keterampilan Memfasilitasi

mencakup :

- Menumbuhkan dan memelihara semangat sosial
- Mediasi dan negosiasi
- Dukungan
- Membangun konsensus
- Memasilitasi kelompok
- Memanfaatkan berbagai sumber daya
- Mengorganisasi
- Komunikasi pribadi

2. Peran dan keterampilan Mendidik

mencakup :

- Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran
- Memberikan informasi
- Konfrontasi
- Kemampuan melatih

3. Peran dan keterampilan Representasi

mencakup :

- Memperoleh berbagai sumber daya
- Advokasi

- Menggunakan media
- Hubungan masyarakat dan presentasi publik
- Jaringan kerja
- Berbagi pengetahuan dan pengalaman

4. Peran dan keterampilan Teknis

mencakup :

- Penelitian
- Menggunakan komputer
- Presentasi verbal dan tertulis
- Manajemen
- Pengaturan keuangan

b. Teknik-Teknik Pekerja Sosial

1. Teknik Wawancara

Keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknik ini :

- Mendengar
- Mencatat
- Mengamati
- Mengajukan pertanyaan
- Mengenal perasaan ambivalensi

2. Teknik Memberi Informasi dan Nasehat

Keterampilan yang diperlukan :

- Pemilihan kata yang tepat
- Keterampilan berbahasa.

- Keterampilan observasi.
- Keterampilan mendengar.
- Keterampilan untuk bersikap secara tepat
- Penyampaian informasi atau pesan secara ringkas (tidak bertele-tele), tepat sasaran tetapi mudah dimengerti.

3. Teknik Diskusi

Keterampilan yang diperlukan :

- Keterampilan berbahasa
- Keterampilan mendengar
- Keterampilan observasi
- Keterampilan mencatat
- Keterampilan mengajukan pertanyaan
- Keterampilan menyusun topik yang menarik bagi klien.

4. Teknik Observasi

Keterampilan yang diperlukan :

- Keterampilan mencatat
- Menggunakan alat-alat perekam (kamera, *handy cam*, *tape recorder*)
- Keterampilan menyusun laporan.

5. Teknik Permainan Peran (*Role Playing*)

Keterampilan yang diperlukan :

- Menentukan topik yang akan diperankan.
- Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan.
- Mengarahkan klien dalam kegiatan.

- Memandu klien utk membuat kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan

6. Teknik Terapi Kursi Kosong

Keterampilan yang diperlukan :

- Menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan.
- Menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan klien menggunakan 'kursi kosong' sebagai tempat mengungkapkan isi hatinya.
- Memandu klien untuk mengeksplorasi permasalahannya.

7. Teknik Perubahan Tingkah Laku

Keterampilan yang diperlukan :

- Keterampilan menjadi model/ccontoh
- Memberikan hadiah (*reward*) dan hukuman (*punishment*) secara tepat (waktu, tempat, intensitas, kualitas).
- Memberikan dorongan penguatan (*reinforcement*) terhadap perubahan perilaku klien yang semakin positif.
- Observasi
- Mencatat dan membuat laporan.

8. Teknik Kompetisi

Keterampilan yang diperlukan :

- Menyampaikan maksud dan tujuan kompetisi
- Menciptakan situasi kompetisi yg kondusif
- Menyusun 'aturan main' yang dapat diikuti dan dilaksanakan oleh semua klien yang berkompetisi.
- Observasi

- Memberikan hadiah kepada pemenang kompetisi dengan tidak mengecilkan hati klien yang tidak menang.

9. Teknik Manajemen Konflik

Keterampilan yang dibutuhkan :

- Mengendalikan situasi dan kondisi konflik.
- Keterampilan mendengar
- Mengarahkan klien yang terlibat konflik utk bersama-sama membuat alternatif solusi
- Mengarahkan klien untuk menggunakan solusi dan kesepakatan sebagai motivasi

2.2 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Masyarakat

2.2.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa wisata merupakan hal yang penting ketika melibatkan masyarakat, di mana masyarakat yang paling tahu apa yang dibutuhkan. Partisipasi yang baik akan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan tahapan pengembangan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengawasan program pengembangan desa wisata. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh kemauan, kesempatan, dan kemampuan dari masyarakat tersebut. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan desa wisata dapat mendorong mereka berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan.

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Eddy Ch. Papilaya dalam Zubaedi (2013:24), mengemukakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakatnya. Strategi pemberdayaan yang lengkap menuntut bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menggunakan kekuatannya dipahami, diperhatikan, dan dipecahkan. Perlu dipahami bahwa pemberdayaan merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu, energi, dan komitmen, serta hasilnya belum tentu memuaskan. Anwas (2013:49) mengemukakan bahwa pengertian pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan pada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan beberapa definisi pemberdayaan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan dan membangun masyarakat dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di dalam tempat tinggalnya

b. Upaya-upaya dalam Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (powerless). Ife Jim dalam Zubaedi (2013:27), mengidentifikasi beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dan dapat digunakan untuk memberdayakan mereka.

1. kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
2. kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
3. kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas mereka untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya publik.
4. kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
- 5) kekuatan sumberdaya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan kontrol terhadap aktivitas ekonomi.

Upaya dalam memberdayakan kelompok masyarakat dapat dilakukan dengan tiga strategi. Pertama, pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan, dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik 18 dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif. Ketiga, pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.

c. Manfaat Pemberdayaan

Dalam pemberdayaan ini dilakukan secara sinergis untuk mendorong keterlibatan semua potensi yang ada, terdapat manfaat dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu:

1. menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Potensi terhadap kemandirian individu yang perlu diberdayakan, yang bersumber dari proses kemandirian tiap individu yang meluas kekeluarga, kelompok serta masyarakat.
2. memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana, dan sasaran yang baik fisik di bidang irigasi, jalan, dan listrik. Maupun bidang sosial sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat akan berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga di bidang pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam 19 upaya pemberdayaan masyarakat ini yang paling terpenting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
3. memberdayakan masyarakat dengan maksud melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah di bidang sosial ekonomi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karenanya, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah

terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah (Damanik, 2019: 10).

d. Strategi Pemberdayaan

Pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga ia dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan itu, agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan bottom-up, dengan cara menggali potensi, masalah, dan kebutuhan masyarakat. 20 Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Suharto dalam Anwas (2013:87) mengemukakan bahwa penerapan pendekatan pemberdayaan dilakukan melalui 5P yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
2. penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang

antara yang kuat dan lemah, dan mencegah adanya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas 21 kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan teringgirkan.
5. pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Keberagaman masyarakat yang memiliki karakter-karakter yang berbeda akan mempengaruhi terhadap agen pemberdayaan dalam memilih cara atau teknik pelaksanaan. Hal ini, tentu mempengaruhi keberhasilan proses dan hasil dari pemberdayaan tersebut.

Dubois dan Miley (dalam Anwas, 2013:88) menjelaskan empat cara dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a) membangun relasi pertolongan yang diwujudkan dalam bentuk: merefleksikan respon rasa empati terhadap sasaran, menghargai pilihan dan hak klien/sasaran untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination), menghargai perbedaan dan keunikan individu, serta menekankan kerjasama Klien (client partnership).
- b) membangun komunikasi yang diwujudkan dalam bentuk menghormati dan harga diri klien/sasaran, mempertimbangkan keragaman individu, berfokus pada klien, serta menjaga kerahasiaan yang dimiliki oleh klien/sasaran.

c) terlibat dalam pemecahan masalah yang dapat diwujudkan dalam bentuk: memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah, menghargai hak-hak klien, merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar, serta melibatkan klien/sasaran dalam membuat keputusan dan kegiatan evaluasinya.

Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial yang diwujudkan dalam bentuk: ketaatan terhadap kode etik profesi; keterlibatan dalam pengembangan profesional, melakukan riset, dan perumusan kebijakan; penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu public, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

2.3 Tinjauan Pengembangan Desa Wisata

2.3.1 Pengembangan Wisata

Pengembangan pariwisata adalah suatu usaha untuk mengembangkan atau memajukan objek wisata agar, objek wisata tersebut lebih baik dan lebih menarik ditinjau dari segi tempat maupun benda-benda yang ada didalamnya untuk dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga dapat disingkat bahwa Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan

ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara berkelanjutan guna kepentingan masa yang akan datang untuk melindungi sumber daya dari efek-efek pengembangan yang mungkin menyebabkan gangguan kultural dan sosial karena tujuan dari pengembangan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pemberdayaan sumber daya yang telah ada.

a. Pengertian Pengembangan Desa Wisata

Suwantoro dalam Amerta (2019:27) mengemukakan bahwa desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik tata ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial budaya masyarakat, adat istiadat keseharian. Di samping itu, mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cendera mata, dan atraksi-atraksi wisata. Berdasarkan definisi desa wisata tersebut, diketahui bahwa substansi yang terkandung dalam desa wisata adalah pengembangan suatu wilayah desa memanfaatkan berbagai potensi dan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata, menjadi suatu rangkaian aktivitas pariwisata yang terpadu. Selain itu, wisatawan akan mendapat pengalaman baru mengenai kehidupan masyarakat pedesaan dan lingkungannya. Alasan utama dalam pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik secara lokal maupun regional atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan perekonomian daerah atau negara tersebut. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata akan selalu diperhitungkan dengan keuntungan

dan manfaat bagi masyarakat banyak. Sehingga dapat disingkat bahwa Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan dengan tujuan mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dalam mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata yaitu memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu obyek dan daya tarik wisata sehingga mampu menjadi mapan dan ramai untuk dikunjungi oleh wisatawan serta mampu memberikan suatu manfaat baik bagi masyarakat di sekitar obyek dan daya tarik dan lebih lanjut akan menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah.

Desa wisata adalah pemahaman terhadap karakter dan kemampuan unsur-unsur yang ada di desa tersebut termasuk pengetahuan dan kemampuan lokal (*indigenous knowledge*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki oleh masyarakat. Adapun yang dimaksudkan pemahaman unsur-unsur desa adalah menghimpun semua atribut-atribut potensial pembentuk produk sebagai dasar perencanaan dan pengemasan desa. unsur-unsur yang dimaksudkan mencakup lingkungan makro yang terdiri atas aspek (1) lingkungan alam, (2) sosial ekonomi dan budaya masyarakat, sedangkan lingkungan mikro yang mencakup (1) arsitektural dan struktur tata ruang serta (2) aspek historis dan lain-lain.

Nuryanti (dalam Antara & Arida, 2015:7) mengemukakan desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata : (a) Akomodasi, sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk; dan (b) Atraksi, seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik

lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, kursus kerajinan khas daerah, bahasa dan lain-lain yang spesifik. Fasilitas lain yang masih sangat diperlukan dalam kawasan desa wisata antara lain adalah sarana transportasi, telekomunikasi (desa digital), kesehatan, dan juga akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata bisa juga menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (homestay) yang nyaman dan bersih. Kriteria untuk menentukan klasifikasi desa wisata bisa mempertimbangkan beberapa hal seperti kondisi objek dan daya tarik wisata tersebut, komunitas masyarakat yang menunjukkan siap berpartisipasi mendukung pariwisata, kondisi jalan menuju objek, keamanan, dan kenyamanan pengunjung, kebersihan lingkungan, pemetaan fasilitas yang mendukung objek dan daya tarik wisata, ketersediaan fasilitas pendukung dalam memenuhi kebutuhan para pengunjung.

Desa wisata merupakan kelompok masyarakat yang perlu dibina pemerintah agar mereka sadar wisata. Desa wisata yang dibina itu adalah masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata (objek wisata). Desa wisata ini hendaknya merupakan sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus 25 untuk menjadi daerah tujuan wisata. Karakteristik desa wisata tersebut seperti penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relative masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian, dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata (Zebuah, 2016: 36). Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian, dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata (Zebuah, 2016: 36).

Keberhasilan suatu desa wisata sebagai destinasi seperti dikatakan oleh Jusuf Sudadi ditentukan oleh lima unsur sebagai berikut:

1. menarik, budaya diolah sehingga menarik, dan kuliner.

2. Infrastruktur jalan;
3. Fasilitas/amenitas tempat menerima pengunjung tersedia
4. Lembaga pengelola yang melakukan manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
5. Perlunya sapta pesona: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (dalam Marsono, 2019:4).

b. Pariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan; pengertian tentang kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pariwisata mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan, menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah bagian integral dari pengembangan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup di dalam masyarakat, melestarikan dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Perkembangan pariwisata secara berkelanjutan menjadi prioritas pemerintah yang membawa perkembangan yang sangat cepat. Potensi wisata yang beranekaragam yang tersebar di setiap daerah tujuan pariwisata dilestarikan dan dikembangkan, karena dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi pelestarian budaya, perekonomian, peningkatan pendidikan dan agama. Selain itu juga perkembangan destinasi wisata dapat memberikan kontribusi terhadap pemerintah daerah.

Weaver & Lawton dalam Prasetyo & Arifin (2018:13), mendefinisikan pariwisata sebagai jumlah proses, aktivitas, dan hasil yang timbul dari hubungan dan interaksi antara wisatawan, pemasok pariwisata, pemerintah tuan rumah, masyarakat tuan rumah, dan lingkungan sekitar yang terlibat dalam menarik, mengangkut, hosting dan pengelolaan turis dan pengunjung lainnya. Dengan demikian pariwisata biasanya dipandang multidimensional, memiliki karakteristik fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Pendapat Matthieson dan Wall dalam Supriadi,dkk. (2017:8) mengenai definisi pariwisata sebagai perpindahan tempat sifatnya sementara yang dilakukan oleh seseorang ke tempat tujuan diluar tempat kediaman dan tempat tinggal mereka, dengan melakukan berbagai kegiatan selama tinggal di tempat tujuan dengan berbagai fasilitas-fasilitas untuk memenuhi kebutuhannya. WTO pada tahun 1991 juga telah mendefinisikan “pariwisata” sebagai berikut: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang di luar lingkungannya kurang dari jangka waktu tertentu dan tujuan utama perjalanannya adalah untuk melakukan kegiatan di tempat yang dikunjungi

c. Strategi Pengembangan Desa Wisata

Purnamasari dalam Damanik (2018:24) mengemukakan bahwa terdapat strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (top down), pendekatan dari bawah (bottom up) dan pendekatan pengeolaan mandiri oleh masyarakat desa (community based management). Perlu dipahami bahwa pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Selain itu unsur-unsur keseimbangan dan keadilan diperlukan dalam pembangunan. Hal ini akan mengurangi ketimpangan. Melalui perencanaan kemudian dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang

tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Prinsip ini perlu diterapkan dalam pembangunan pariwisata. Wood (2002) mengungkapkan bahwa sebuah program pariwisata yang baik harus mengikutsertakan beberapa elemen berikut: konservasi atas biodiversiti berkelanjutan, mengikutsertakan masyarakat lokal, memberikan interpretasi dan menambah pengalaman, mendorong melakukan aksi positif, mendorong berkembangnya industri kecil, konservasi sumber daya tidak terbarukan, memfokuskan pada partisipasi lokal dan kesempatan berusaha bagi masyarakat pedesaan.

Butler dalam Amerta (2019:14) mengemukakan bahwa terdapat enam tahap pengembangan pariwisata yang membawa implikasi serta dampak yang berbeda, secara teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. tahap eksplorasi, pertumbuhan spontan dan penajajakan (exploration). Pada tahap ini jumlah wisatawan petualang relative kecil. Mereka cenderung dihadapkan pada keindahan alam dan budaya yang masih alami di daerah tujuan wisata. Fasilitas pariwisata dan kemudahan yang didapat wisatawan juga kurang baik. Atraksi di daerah wisata belum berubah oleh pariwisata dan kontak dengan masyarakat lokal relative tinggi.
2. Tahap keterlibatan (involment), pada tahap ini mulai adanya inisiatif masyarakat lokal menyediakan fasilitas wisata, kemudian promosi daerah wisata dimulai dengan dibantu oleh keterlibatan pemerintah. Hasilnya terjadinya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
3. Tahap pengembangan dan pembangunan (development), pada tahap ini jumlah wisatawan yang datang meningkat tajam. Pada musim puncak wisatawan biasanya menyamai, bahkan melebihi jumlah penduduk lokal. Investor luar berdatangan

memperbarui fasilitas. Sejalan dengan meningkatnya jumlah dan popularitas daerah pariwisata, masalah-masalah rusaknya fasilitas mulai terjadi. Perencanaan dan kontrol secara nasional dan regional menjadi dibutuhkan, bukan hanya untuk pemecahan masalah yang terjadi, melainkan juga untuk pemasaran internasional.

4. Tahap konsolidasi (consolidation), pada tahap ini tingkat pertumbuhan sudah mulai menurun walupun total jumlah wisatawan masih relatif meningkat. Daerah pariwisata belum berpengalaman mengatasi masalah dan kecenderungan terjadinya monopoli yang sangat kuat.
5. Tahap kestabilan (stagnation), pada tahap ini jumlah wisatawan yang datang berada pada puncaknya. Artinya, wisatawan tidak mampu lagi dilayani oleh daerah tujuan wisata. Ini disadari bahwa kunjungan ulangan wisatawan dan pemanfaatan bisnis dan komponen-komponen lain pendukungnya dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah wisatawan yang berkunjung. Daerah tujuan wisata mungkin mengalami masalah-masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dari definisi di atas diketahui bahwa yang dimaksud pengembangan adalah suatu aktivitas memajukan desa wisata dengan menggali berbagai potensi yang bisa dikembangkan menjadi suatu daya tarik wisata alternatif. Aktivitas tersebut dikelola oleh masyarakat lokal, ramah lingkungan, berkelanjutan, serta dapat meningkatkan kehidupan sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat.

d. Dampak Pariwisata

Dampak dari adanya pariwisata terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata, adapun dampak-dampak pariwisata dari segi sosialekonomi dan sosial budaya yaitu:

1. Dampak sosial ekonomi, dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi 8 kelompok besar, yaitu:
 - a) dampak terhadap penerimaan devisa,
 - b) Dampak terhadap pendapatan masyarakat,
 - c) Dampak terhadap kesempatan kerja,
 - d) Dampak terhadap harga-harga,
 - e) Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan,
 - f) Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol,
 - g) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya dan
 - h) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

2. Dampak sosial budaya, secara teoritis dampak sosial budaya di kelompokkan mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam kelompok besar yaitu:
 - a) Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya
 - b) Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat;
 - c) Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/ atau kelembagaan sosial;
 - d) Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
 - e) Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat.

e. Kebijakan Pariwisata

Fennel (1999) mengemukakan bahwa perencanaan pariwisata memerlukan kebijakan, maksud dan tujuan untuk diimplementasikan dalam proses perencanaan serta pelaksanaan biasanya dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, Gunn (1988) mengemukakan bahwa untuk rencana yang akan dilaksanakan diperlukan pemerintahan dan kombinasi antara tanggung jawab

sektor swasta dan publik dalam perencanaan. Lickorish (1991) menyatakan bahwa pemerintah sering melihat tanggung jawab kebijakan pariwisata sebagai pemangku sektor pribadi/swasta. Williams (1998) dan Hall dan Jenkins (1995) menunjukkan bahwa perencanaan pariwisata melibatkan kedua badanbadan sektor publik dan swasta. Hal ini merupakan salah satu dari 33 beberapa alasan mengapa perencanaan pariwisata belum efektif dan tidak sesuai dengan harapan perencanaan. Kebijakan pariwisata melibatkan sejumlah ide dan pernyataan yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan pariwisata (Wilkinson, 1997). Hirschmann (1976) menyarankan kebijakan pariwisata berbeda dari banyak kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah (Supriadi,dkk, 2017:33).

Referensi konflik menyimpulkan bahwa perencanaan pariwisata adalah proses politik bahwa kebijakan pariwisata yang diputuskan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan pariwisata. Gunn (1988) dan Veal (1944) juga menegaskan bahwa perencanaan pariwisata sangat banyak dipengaruhi oleh proses politik. Kebijakan pariwisata adalah pelaksanaan rencana pariwisata. Manajemen pariwisata melibatkan pengawasan dan pemantauan yang berkelanjutan tentang dampak dari rencana pariwisata dan kebijakan pariwisata. Hubungan antara perencanaan dan manajemen agak lebih kompleks, salah satu peran penting dari manajer sebagai proses utama manajemen adalah perencanaan, oleh karena itu kegiatan perencanaan dan proses manajemen cenderung terjadi secara simultan dalam konteks tertentu.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kebijakan Pokok Mewadahi, membangun dan mengembangkan manfaat potensi pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi Diparda sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan

kawasan wisata Melaksanakan kerjasama pariwisata antar daerah dan dunia usaha. Kebijakan Spasial (keruangan) Pariwisata

Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan daya tarik wisata. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata Asas keberlanjutan (sustainability), keserasian (harmonizes), keterjangkauan (affordability) dan kerakyatan merupakan landasan pokok dalam pengembangan produk wisata. - Keberlanjutan mengandung arti : pengembangan produk wisata bukan hanya ditujukan bagi pengembangan saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang.

Pengembangan produk wisata yang bernuansa lingkungan hidup, yaitu dengan selalu memperhatikan kelestarian alam, adat istiadat dan budaya daerah. Keterjangkauan mengandung arti : pengembangan produk wisata tidak hanya ditujukan bagi kalangan tertentu, tetapi produk wisata yang dikembangkan tersebut harus dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Kerakyatan mengandung arti : pengembangan produk wisata tidak hanya menguntungkan beberapa golongan tertentu tetapi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar obyek dan potensi wisata yang bersangkutan. Pengembangan produk wisata diarahkan bagi penguatan identitas daerah yang dapat memunculkan “warna” pariwisata kabupaten Garut yang khas serta memiliki keunikan dan keunggulan daya saing oleh karenanya diperlukan penggalian, penataan dan pengembangan diversifikasi produk wisata. Perlunya penetapan produk wisata unggulan bagi Kabupaten Garut sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten garut. Obyek-obyek dan daya tarik wisata budaya dan kesenian daerah serta event-event pariwisata masih harus didukung oleh Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pematapan pembinaan seni budaya dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu. Kebijakan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata. Pengembangan obyek

dan daya tarik wisata menyangkut aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, oleh karenanya pembangunan obyek dan daya tarik wisata harus didasarkan pada sistem perencanaan. b. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan Satuan Kawasan Wisata